



Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusif di Madrasah Melalui Studi Literatur

M. Azzubair¹, Juliani², Muhammad Rasyid Ridha³, Nurma⁴, Nazwa Fathiyatul Haq⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: muhammadazzubair378@gmail.com.

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di madrasah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kesetaraan hak pendidikan bagi semua anak, termasuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, hambatan, dan strategi penguatan kebijakan inklusi di lembaga pendidikan Islam melalui tinjauan literatur sistematis terhadap 18 referensi ilmiah terbaru. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan inklusi telah selaras dengan tujuan global, namun secara operasional masih terkendala pada aspek kompetensi guru, keterbatasan sarana prasarana, dan dukungan manajemen yang belum optimal. Ditemukan bahwa kepemimpinan visioner kepala madrasah dan adaptasi Kurikulum Merdeka menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Penelitian ini menyimpulkan perlunya revitalisasi sistem pendukung inklusi di madrasah guna menciptakan lingkungan belajar yang ramah diversitas.

Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Madrasah, Pendidikan Inklusif, Studi Literatur.

ABSTRACT

Inclusive education is a national strategy in Indonesia to ensure equal access to education for all children, including those with special needs. This study aims to analyze the effectiveness, barriers, and strategies for strengthening inclusive policies in Islamic educational institutions through a literature review of 18 recent scientific references. The results show that while policies align with global goals, operational challenges remain in teacher competence, infrastructure, and management support. Key findings emphasize that visionary leadership and the adaptation of the Merdeka Curriculum are crucial for success. The study concludes that a revitalization of support systems is necessary to create a diversity-friendly learning environment in madrasahs.

Keywords: Policy Analysis, Madrasah, Inclusive Education, Literature Study.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif merupakan strategi nasional di Indonesia untuk menjamin akses pendidikan yang merata, selaras dengan tujuan global *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pendekatan ini menekankan pada partisipasi penuh semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan belajar khusus, dalam lingkungan sekolah reguler. Secara filosofis, setiap individu memiliki hak asasi yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam memiliki tanggung jawab moral dan teologis untuk mengakomodasi keragaman ini melalui konsep keadilan sosial (Anwar dkk., 2024.).

Namun, transisi menuju sistem inklusif menghadapi tantangan kompleks, mulai dari stigma sosial hingga keterbatasan sumber daya operasional. Di lingkungan madrasah, kebijakan ini telah diatur secara formal melalui berbagai regulasi, namun praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar. Banyak lembaga yang menyelenggarakan inklusi hanya sebagai formalitas tanpa didukung kesiapan sistemik (Huda & Hafni 2025.). Kondisi ini memerlukan analisis mendalam melalui studi literatur untuk memetakan solusi strategis bagi madrasah.

Setiap anak memiliki keunikan yang harus dihargai dalam ekosistem pendidikan. Pendidikan inklusif bukan hanya soal menempatkan anak berkebutuhan khusus di kelas reguler, melainkan tentang bagaimana sistem sekolah beradaptasi dengan kebutuhan mereka (Sumartik, 2024.). Di Madrasah Ibtidaiyah, pendekatan ini harus disinergikan dengan nilai-nilai inklusi dalam pendidikan Islam yang menekankan kesetaraan di hadapan Allah (Wathoni, 2023.). Tanpa pemahaman teologis yang kuat, kebijakan ini sering dianggap sebagai beban tambahan oleh tenaga pendidik.

Kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas di madrasah seringkali dipicu oleh minimnya sosialisasi dan dukungan teknis. Madrasah seringkali harus berjuang mandiri tanpa Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang mumpuni (Rahmi, 2022). Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana literatur terkini memotret dinamika ini. Melalui tinjauan berbagai penelitian terdahulu, diharapkan ditemukan benang merah strategis untuk memperbaiki kualitas layanan inklusif di madrasah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (Assingily, 2021), dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber primer yang relevan dengan lokus pendidikan inklusif di madrasah. Referensi yang dianalisis berjumlah 18 dokumen, terdiri dari jurnal ilmiah terakreditasi, skripsi, dan dokumen kebijakan resmi dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2019-2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Analisis data dilakukan dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data secara tematik, dan penarikan kesimpulan. Peneliti membagi temuan literatur ke dalam empat tema besar: kesiapan guru, manajemen kepemimpinan, kurikulum merdeka, dan adaptasi teknologi digital. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber teori dengan membandingkan temuan dari berbagai peneliti untuk mendapatkan generalisasi yang akurat. Hasil analisis kemudian disintesis untuk memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan madrasah inklusif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kesiapan Pendidik dan Kompetensi Pedagogik Inklusif

Kesiapan guru merupakan variabel penentu utama keberhasilan pendidikan inklusif di madrasah. Berdasarkan analisis literatur, sebagian besar guru memiliki persepsi positif terhadap program inklusi namun merasa tidak siap secara kompetensi teknis (Firli & Widayastono, 2020). Ketidaksiapan ini mencakup aspek pedagogik dalam

merancang instruksi yang didiferensiasi dan melakukan asesmen yang tepat bagi siswa dengan hambatan tertentu. Tanpa pelatihan yang memadai, guru cenderung mengalami hambatan dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik siswa berkebutuhan khusus di kelas reguler.

Banyak tenaga pendidik yang masih menghadapi kendala besar dalam memahami karakteristik spesifik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK). Minimnya pengetahuan tentang Pendidikan Luar Biasa (PLB) menyebabkan guru merasa kesulitan dalam memberikan penanganan yang sesuai (Muttaqya dkk, 2025.). Hal ini seringkali berujung pada pemberian materi yang disamaratakan antara siswa reguler dengan PDBK. Akibatnya, esensi inklusi untuk memberikan keadilan pendidikan bagi tiap individu menjadi sulit tercapai secara maksimal di tingkat madrasah ibtidaiyah.

Strategi guru dalam mengelola kelas inklusif sangat krusial melalui penggunaan metode instruksi individual dan pembelajaran kolaboratif antar siswa (Octavia Ramadani Uspan et al., n.d.). Guru dituntut untuk menjadi fasilitator yang kreatif, mampu menggunakan media pembelajaran yang aksesibel bagi semua jenis hambatan siswa. Kolaborasi dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK) atau tenaga ahli lainnya menjadi solusi praktis dalam berbagi peran. Namun, kenyataannya jumlah GPK di madrasah masih sangat minim dibandingkan jumlah siswa yang membutuhkan layanan (Huda & Hafni, 2025.).

Selain kompetensi teknis, sikap inklusif guru juga menjadi fondasi penting dalam menciptakan ekosistem belajar yang sehat. Sikap yang memandang PDBK sebagai bagian dari keragaman normal manusia akan menciptakan atmosfer kelas yang hangat dan saling menghargai. Sebaliknya, sikap yang masih memandang sebelah mata atau merasa terbebani dengan kehadiran PDBK akan menghambat perkembangan psikososial siswa (Suriaman & Rasau, 2023.). Pengembangan profesionalisme guru madrasah harus menyentuh sisi kognitif sekaligus afektif untuk mengubah paradigma pendidikan yang eksklusif menjadi inklusif.

Kurangnya dukungan berkelanjutan pasca pelatihan juga menjadi keluhan umum di kalangan asatidz. Pelatihan yang bersifat one-shot atau sekali jalan tanpa ada pendampingan di kelas tidak cukup untuk mengubah cara mengajar guru. Diperlukan komunitas praktisi atau Kelompok Kerja Guru (KKG) khusus inklusi di tingkat madrasah agar para pendidik bisa saling berbagi strategi dan praktik baik (Sumartik, 2024.). Dengan adanya dukungan rekan sejawat, beban mental guru dalam menghadapi keragaman siswa di kelas dapat tereduksi secara signifikan.

Peran Kepemimpinan Visioner dalam Manajemen Madrasah

Keberhasilan inklusi di madrasah sangat bergantung pada peran kepala madrasah sebagai leader visioner. Pemimpin yang memiliki visi masa depan mampu membangun budaya organisasi yang inklusif, efektif, dan berintegritas (Shobri, 2025). Kepemimpinan visioner tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang menghargai setiap individu. Kepala madrasah harus mampu meyakinkan seluruh warga sekolah, termasuk orang tua siswa reguler, bahwa inklusi adalah bentuk nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam.

Kepemimpinan yang suportif berdampak langsung pada efektivitas manajemen sekolah dalam menyediakan fasilitas dan dukungan khusus bagi PDBK (Kinanthi et al., 2024). Manajemen madrasah harus proaktif dalam mengalokasikan anggaran untuk

pengadaan alat bantu belajar dan renovasi aksesibilitas fisik bangunan. Tanpa komitmen kuat dari pimpinan, kebijakan inklusi hanya akan menjadi beban tambahan bagi guru tanpa adanya solusi nyata dari sisi manajerial. Kepemimpinan yang baik akan mampu menggerakkan sumber daya yang terbatas untuk hasil yang optimal.

Dalam konteks madrasah, kepemimpinan visioner juga berarti mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam penguatan mutu pendidikan. Nilai-nilai seperti keadilan ('adalah), kasih sayang (rahmah), dan kesetaraan (musawah) harus menjadi landasan setiap kebijakan sekolah. Budaya madrasah yang religius menjadi modal sosial yang kuat untuk menghapus diskriminasi terhadap siswa penyandang disabilitas (Shobri, 2025). Integrasi ini membedakan madrasah dengan sekolah umum dalam hal pendekatan etika dan moral terhadap keberagaman.

Tantangan manajemen lainnya adalah masalah legalitas operasional penyelenggaraan inklusi. Banyak madrasah menyelenggarakan inklusi secara mandiri namun belum mendapatkan pengakuan legal-formal, sehingga sulit mengakses bantuan pendanaan dari pemerintah (Syarifudin, 2021). Kepala madrasah dituntut untuk cakap dalam menjalin komunikasi dengan kementerian terkait dan memastikan lembaga memenuhi standar penyelenggara inklusi. Sinergi antara kepemimpinan teknis dan visi ideologis menjadi kunci utama keberlangsungan program inklusi yang berkualitas di madrasah.

Evaluasi Kebijakan dan Implementasi Kurikulum Merdeka

Implementasi kebijakan inklusi di Indonesia secara normatif sudah selaras dengan tujuan global, namun secara operasional masih lemah pada aspek input dan process (Anwar dkk., 2024.). Evaluasi menggunakan model CIPP menunjukkan adanya celah pada ketersediaan sarana prasarana dan kompetensi tenaga pendidik. Selain itu, lemahnya koordinasi lintas lembaga mengakibatkan mekanisme pemantauan program tidak berjalan secara berkelanjutan. Evaluasi rutin sangat diperlukan untuk memastikan program rintisan madrasah inklusif tetap berada pada jalur yang benar (Dicky Artanto et al., 2023).

Kurikulum Merdeka Belajar hadir sebagai solusi untuk memberikan fleksibilitas bagi madrasah dalam mengembangkan potensi PDBK. Optimalisasi kurikulum ini memungkinkan penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang disesuaikan dengan profil belajar masing-masing siswa (Zuhriyah, 2024.). Dengan kurikulum yang fleksibel, PDBK tidak lagi dipaksa mencapai standar kompetensi yang sama dengan siswa reguler, melainkan didorong untuk berkembang sesuai dengan bakat unik mereka dalam kerangka pendidikan Islam.

Di madrasah seperti MI Al-Ma'arif 02 Jember, penerapan Kurikulum Merdeka terbukti mampu meningkatkan kesetaraan pendidikan. Melalui penyesuaian materi dan metode evaluasi yang lebih inklusif, siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih percaya diri (Zuhriyah, 2024.). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang inklusif harus didukung oleh instrumen kurikulum yang adaptif dan guru yang berani melakukan inovasi pedagogis sesuai kondisi riil siswa di dalam kelas.

Hambatan dalam penyesuaian kurikulum masih sering ditemukan terkait pemahaman guru yang parsial terhadap prinsip merdeka belajar (Sumartik, 2024.). Seringkali fleksibilitas kurikulum disalahartikan sebagai penurunan standar tanpa adanya strategi pengayaan yang tepat. Diperlukan panduan teknis yang lebih aplikatif

dari otoritas pendidikan untuk membantu guru madrasah dalam melakukan modifikasi kurikulum tanpa menghilangkan esensi kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa.

Selain itu, kurikulum di madrasah juga harus mampu mengintegrasikan pendidikan karakter yang berbasis inklusi. Nilai-nilai moderasi beragama dapat menjadi pintu masuk untuk menanamkan sikap menghargai perbedaan fisik maupun kognitif sejak usia dini (Sulaiman Kurdi & Yani Km, 2023). Kurikulum tidak boleh hanya mengejar target kognitif, tetapi juga harus membentuk empati sosial siswa reguler terhadap teman-temannya yang memiliki kebutuhan khusus. Penyelarasan kurikulum akademik dan kurikulum karakter ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi madrasah.

Terakhir, monitoring berkelanjutan terhadap implementasi kurikulum merdeka harus dilakukan secara partisipatif. Pelibatan pengawas madrasah, kepala sekolah, dan guru dalam sesi refleksi berkala dapat membantu mengidentifikasi kesulitan teknis lebih awal (Rahmi, 2022). Dengan evaluasi berbasis data yang akurat, madrasah dapat melakukan perbaikan yang tepat sasaran, sehingga kebijakan kurikulum yang dicanangkan tidak hanya berakhir sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata di ruang kelas.

Adaptasi Teknologi Digital dan E-Learning Inklusif

Di era transformasi digital, madrasah dituntut untuk membangun pendekatan kolaboratif-inklusif melalui adaptasi e-learning. Meskipun infrastruktur teknologi dasar mulai terbangun, aksesibilitas digital bagi siswa disabilitas masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. E-learning yang inklusif harus menyediakan fitur-fitur yang memudahkan akses bagi siswa dengan berbagai jenis disabilitas, seperti penggunaan narasi suara atau teks alternatif pada media visual (Purnama & Susanna, 2020).

Kompetensi asatidz dalam mengelola platform digital inklusif perlu didukung melalui pelatihan berkelanjutan. Adaptasi teknologi bukan sekadar digitalisasi materi, tetapi bagaimana menciptakan interaksi belajar yang setara melalui bantuan teknologi asistif (Purnama & Susanna, 2020). Inovasi teknologi ini sangat membantu siswa PDBK untuk mengatasi hambatan fisik dalam mengakses ilmu pengetahuan. Madrasah yang mampu mengadopsi teknologi secara inklusif akan memiliki nilai tambah dalam pelayanan pendidikan di era modern.

Manfaat e-learning mencakup fleksibilitas waktu dan sumber belajar yang tidak terbatas. Bagi PDBK, platform digital memungkinkan mereka belajar dengan kecepatan yang sesuai tanpa merasa tertinggal oleh rekan kelasnya (Purnama & Susanna, 2020). Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada ketersediaan perangkat dan stabilitas jaringan di lingkungan madrasah. Kesenjangan akses digital dapat menjadi hambatan baru jika tidak dikelola dengan prinsip keadilan bagi seluruh siswa.

Secara ideologis, penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah merupakan wujud pengamalan nilai Pancasila dan prinsip keadilan sosial (Sari et al., 2022). Penggunaan teknologi dalam pendidikan harus diarahkan untuk menghapus diskriminasi dan memberikan peluang yang sama bagi kelompok marginal. Madrasah memiliki peran strategis untuk membuktikan bahwa pendidikan Islam sangat terbuka terhadap kemajuan teknologi asalkan digunakan untuk kemaslahatan dan kesetaraan

seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan fisik maupun kognitif (Sulaiman Kurdi & Yani Km, 2023).

Pemberdayaan Orang Tua dan Sinergi Masyarakat

Keberhasilan pendidikan inklusif di madrasah tidak dapat dipisahkan dari peran serta orang tua sebagai pendidik utama di lingkungan keluarga. Sering ditemukan adanya ketimpangan antara pola asuh di rumah dan pola pengajaran di sekolah, yang sering kali menghambat kemajuan perkembangan perilaku PDBK (Rahmi, 2022). Penting bagi madrasah untuk membangun saluran komunikasi yang transparan melalui buku penghubung atau pertemuan rutin komunitas orang tua. Sinergi ini bertujuan untuk menyelaraskan target perkembangan anak agar apa yang telah dicapai di madrasah dapat diperkuat kembali melalui stimulasi yang konsisten di lingkungan rumah. Namun, tantangan sosiologis yang muncul adalah adanya stigma negatif yang masih melekat pada keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Di beberapa lingkungan masyarakat, anak dengan disabilitas masih dianggap sebagai beban, yang membuat orang tua cenderung menyembunyikan kondisi anak mereka alih-alih memberikan intervensi dini (Octavia Ramadani Uspan et al., n.d.). Madrasah memiliki peran strategis untuk memberikan edukasi kepada wali murid mengenai nilai-nilai inklusivitas dalam Islam. Dengan mengubah perspektif masyarakat, lingkungan madrasah akan menjadi ekosistem yang lebih ramah bagi tumbuh kembang PDBK tanpa diskriminasi sosial.

Selain dukungan emosional, keterlibatan orang tua juga mencakup partisipasi aktif dalam penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI). Orang tua adalah sumber informasi utama mengenai minat dan hambatan spesifik yang dialami anak (Zuhriyah, 2024). Dalam konteks madrasah inklusif, kolaborasi ini harus diatur secara sistematis melalui komite sekolah. Ketika orang tua merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka akan memiliki rasa memiliki (*sense of belonging*) yang lebih tinggi terhadap program inklusi yang dijalankan.

Di sisi lain, madrasah perlu menjalin kemitraan dengan organisasi profesional seperti psikolog atau pusat sumber (*resource center*). Mengingat keterbatasan Guru Pembimbing Khusus (GPK), kerja sama dengan pihak eksternal menjadi solusi untuk melakukan asesmen diagnostik (Syaifudin, 2021). Luar juga dapat berperan sebagai donatur untuk membantu penyediaan sarana aksesibel yang belum sanggup dipenuhi anggaran internal. Sinergi lintas sektor ini akan memperkuat struktur pendukung inklusi dari tingkat makro hingga mikro. Edukasi publik mengenai keberagaman harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kampanye di media sosial madrasah. Narasi yang dibangun harus mengedepankan keberhasilan-keberhasilan kecil yang dicapai oleh PDBK sebagai bentuk apresiasi atas kemanusiaan (Sulaiman Kurdi & Yani Km, 2023). Hal ini selaras dengan prinsip moderasi beragama yang menekankan penghormatan terhadap martabat setiap insan. Dengan kuatnya dukungan dari orang tua dan masyarakat, madrasah inklusif akan bertransformasi menjadi pusat peradaban yang memanusiakan manusia dalam segala keberagamannya.

Infrastruktur Aksesibel dan Desain Universal untuk Pembelajaran

Ketersediaan sarana yang aksesibel merupakan instrumen fisik yang menentukan tingkat kemandirian siswa di lingkungan madrasah. Banyak madrasah di daerah pinggiran masih memiliki kendala besar dalam aksesibilitas fisik seperti

ketersediaan bidang miring (ramp) dan toilet ramah disabilitas (Anwar et al., n.d.). Tanpa infrastruktur yang memadai, PDBK akan selalu bergantung pada bantuan orang lain untuk mobilitas, yang dapat menurunkan rasa percaya diri mereka. Oleh karena itu, renovasi fisik madrasah harus menjadi prioritas dalam rencana pengembangan jangka menengah lembaga. Konsep Universal Design for Learning (UDL) perlu diintegrasikan dalam penyediaan media ajar agar kurikulum dapat digunakan oleh semua siswa tanpa modifikasi yang rumit (Sumartik, 2024) Misalnya, penggunaan buku teks digital yang memiliki fitur audio-to-text yang membantu siswa dengan berbagai gaya belajar. Dengan menerapkan prinsip UDL, madrasah tidak hanya membantu siswa dengan disabilitas, tetapi juga membantu siswa reguler. Inovasi ini menciptakan lingkungan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik.

Pemanfaatan alat bantu asistif berbasis teknologi juga mulai menjadi kebutuhan mendesak. Alat bantu seperti mesin braille atau perangkat lunak khusus autisme dapat membantu menjembatani kesenjangan kognitif (Kinanthi et al., 2024). Namun, pengadaan alat-alat ini sering kali terkendala biaya tinggi, sehingga madrasah didorong menciptakan alat peraga edukatif (APE) berbasis bahan lokal yang murah. Kreativitas guru dalam merancang media ajar yang inklusif merupakan kunci utama dalam mengatasi keterbatasan anggaran sarana prasarana. Aspek keamanan lingkungan madrasah juga harus diperhatikan, termasuk pengaturan pencahayaan dan akustik ruang untuk meminimalisir gangguan bagi siswa (Dicky Artanto et al., 2023). Lingkungan yang nyaman secara sensorik akan membantu siswa berkebutuhan khusus untuk lebih fokus dalam menyerap materi pelajaran. Perencanaan ruang yang sensitif terhadap kebutuhan disabilitas mencerminkan keseriusan manajemen dalam memberikan layanan yang adil. Lingkungan fisik yang inklusif adalah prasyarat bagi terciptanya iklim akademis yang kondusif.

Sinergi antara teknologi digital dan ruang fisik dapat dioptimalkan melalui konsep smart inclusive classroom. Di madrasah yang memiliki akses internet stabil, penggunaan smart board dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa (Huda & Hafni, 2025). Teknologi ini memungkinkan guru memberikan umpan balik secara real-time kepada PDBK tanpa mengganggu ritme belajar siswa lain. Digitalisasi fasilitas ini harus diimbangi dengan pelatihan teknis bagi tenaga kependidikan agar sarana yang ada benar-benar fungsional bagi pembelajaran. Pembangunan infrastruktur inklusif memerlukan komitmen kebijakan anggaran yang berpihak pada kaum minoritas. Pemerintah harus memberikan skema bantuan khusus bagi madrasah yang berkomitmen menjadi penyelenggara inklusi (Syarifudin, 2021). Selain itu, audit aksesibilitas secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan standar fasilitas sesuai dengan regulasi nasional. Infrastruktur yang inklusif bukan sekadar masalah fisik, melainkan manifestasi nyata dari nilai keadilan yang menjadi ruh utama pendidikan Islam.

Perspektif Teologis dan Moderasi Beragama dalam Inklusi

Pendidikan inklusif di madrasah berakar pada nilai teologis Islam yang menghargai kemuliaan manusia (karamah al-insaniyyah). Dalam pandangan Islam, keberagaman fisik dan mental adalah bagian dari sunnatullah dan tanda kebesaran Sang Pencipta (Shobri, 2025). Narasi teologis ini harus menjadi materi dasar dalam pembinaan karakter bagi guru dan siswa reguler. Dengan memahami bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, maka praktik

perundungan terhadap siswa berkebutuhan khusus dapat ditekan melalui pendekatan spiritual. Konsep moderasi beragama sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif, di mana sikap moderat (*wasathiyah*) mengajarkan untuk selalu adil dalam memandang perbedaan (Sulaiman Kurdi & Yani Km, 2023). Madrasah inklusif menjadi laboratorium nyata bagi pengamalan moderasi, di mana siswa belajar untuk berempati dan toleran. Ini adalah bentuk implementasi *hablum minannas* yang paling konkret dalam lingkungan pendidikan Islam. Moderasi beragama memastikan bahwa tidak ada satu pun individu yang terpinggirkan dari akses pendidikan yang bermutu.

Reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan diperlukan agar tidak terjadi salah paham yang menjustifikasi diskriminasi (Rahmi, 2022). Kurikulum madrasah harus menyajikan kisah inspiratif tokoh-tokoh difabel dalam sejarah Islam yang memiliki kontribusi besar. Dengan memberikan contoh teladan (*uswah hasanah*), siswa akan tumbuh dengan mentalitas inklusif. Pendidikan agama harus menjadi solusi bagi masalah sosial dan penghapusan sekat-sekat eksklusivisme di tengah masyarakat. Integrasi nilai inklusivitas dalam pembelajaran agama juga memperkuat resiliensi psikologis bagi PDBK (Shobri, 2025). Melalui pemahaman yang benar, mereka akan merasa bahwa keterbatasan bukanlah hukuman, melainkan ruang untuk tetap berprestasi. Hal ini membangun rasa percaya diri yang tinggi bagi siswa berkebutuhan khusus. Madrasah inklusif berbasis nilai teologis akan menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kesalehan sosial tinggi sebagai profil pelajar *rahmatan lil 'alamin*.

Strategi Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran Adaptif

Asesmen dalam pendidikan inklusif di madrasah menuntut pergeseran paradigma dari penilaian hasil akhir menjadi penilaian berbasis proses yang berkelanjutan. Data literatur menunjukkan bahwa guru madrasah sering kali merasa kesulitan dalam menentukan standar kelulusan bagi PDBK (Anwar et al., n.d.). Hal ini disebabkan oleh keterpaksaan menggunakan standar KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) reguler yang tidak mengakomodasi keragaman hambatan siswa. Oleh karena itu, madrasah perlu mengembangkan instrumen asesmen adaptif yang memungkinkan siswa dievaluasi berdasarkan kemajuan individual mereka masing-masing, bukan berdasarkan rata-rata kelas.

Implementasi Kurikulum Merdeka memberikan peluang besar melalui asesmen diagnostik di awal pembelajaran. Guru diharapkan mampu memetakan kemampuan dasar siswa sebelum menyusun materi (Zuhriyah, 2024). Hasil asesmen ini kemudian dituangkan dalam Program Pembelajaran Individual (PPI) yang menjadi kompas bagi guru dalam memberikan intervensi. Tanpa asesmen diagnostik yang akurat, bantuan pendidikan yang diberikan di madrasah berisiko salah sasaran atau bahkan membebani siswa dengan materi yang melampaui kapasitas kognitif mereka.

Modifikasi instrumen penilaian juga mencakup penyesuaian cara dan waktu pengerjaan tugas. Misalnya, bagi siswa dengan hambatan penglihatan, ujian dapat diberikan dalam bentuk lisan atau menggunakan perangkat lunak pembaca layar, sementara bagi siswa dengan hambatan konsentrasi, waktu pengerjaan dapat diberikan lebih panjang dengan instruksi yang lebih sederhana (Octavia Ramadani Uspan et al., n.d.). Fleksibilitas ini bukan berarti menurunkan kualitas pendidikan, melainkan bentuk keadilan prosedural agar setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Evaluasi hasil belajar di

madrasah juga harus mencakup aspek non-akademis, seperti perkembangan karakter dan kemandirian sosial. Penilaian kualitatif melalui portofolio atau observasi perilaku menjadi lebih relevan bagi PDBK dibandingkan nilai angka murni. Dokumentasi mengenai perkembangan perilaku positif, keberanian berinteraksi, dan peningkatan keterampilan spiritual merupakan indikator keberhasilan yang sangat berharga dalam konteks pendidikan Islam (Shobri, 2025). Pendekatan holistik ini memastikan bahwa setiap pencapaian siswa, sekecil apa pun, tetap mendapatkan apresiasi yang layak dari pihak madrasah.

Terakhir, hasil evaluasi harus dikomunikasikan secara berkala kepada orang tua untuk menjamin keberlangsungan program di rumah. Diskusi antara guru dan orang tua mengenai capaian siswa akan melahirkan rekomendasi tindak lanjut yang lebih efektif. Madrasah harus memosisikan rapor bukan sebagai “vonis” keberhasilan atau kegagalan, melainkan sebagai alat refleksi untuk perbaikan layanan pendidikan ke depannya (Syaifudin, 2021). Dengan sistem evaluasi yang suportif dan transparan, ekosistem inklusi di madrasah akan terus tumbuh menjadi lebih inklusif dan berkualitas.

SIMPULAN

Analisis kebijakan pendidikan inklusif di madrasah menunjukkan bahwa tantangan terbesar terletak pada implementasi teknis di lapangan, bukan pada regulasi normatifnya. Kesiapan guru, kepemimpinan visioner, fleksibilitas kurikulum, dan adaptasi teknologi merupakan empat pilar utama yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan inklusi. Evaluasi berbasis model CIPP sangat diperlukan secara berkala untuk menutup celah pada aspek input dan proses yang selama ini masih lemah, terutama dalam koordinasi lintas lembaga dan pemantauan program yang berkelanjutan. Dengan sinergi antara nilai-nilai religius dan kebijakan pendidikan nasional, madrasah dapat bertransformasi menjadi lembaga pendidikan yang benar-benar ramah terhadap diversitas dan memberikan keadilan pendidikan bagi seluruh anak bangsa.

Lebih lanjut, penguatan ekosistem pendukung menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda, terutama dalam membangun sinergi antara madrasah, orang tua, dan masyarakat luas. Partisipasi aktif orang tua dalam penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) sangat krusial agar stimulasi yang diberikan di madrasah dapat diperkuat secara konsisten di lingkungan keluarga. Upaya ini harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang aksesibel, mulai dari renovasi fisik bangunan hingga penerapan konsep Universal Design for Learning (UDL) agar lingkungan belajar mampu mengakomodasi kemandirian setiap peserta didik. Adaptasi teknologi digital dan e-learning inklusif juga berperan sebagai katalisator untuk menjembatani hambatan kognitif melalui bantuan teknologi asistif yang setara.

Secara substantif, pendidikan inklusif di madrasah harus berpijak pada nilai teologis karamah al-insaniyyah dan prinsip moderasi beragama yang memandang keberagaman sebagai sunnatullah. Paradigma ini harus tercermin dalam strategi asesmen adaptif yang beralih dari standar ketuntasan tunggal menuju penilaian berbasis proses dan kemajuan individual yang lebih manusiawi. Dengan mengintegrasikan nilai spiritual, kepemimpinan yang suportif, dan inovasi kurikulum Merdeka yang fleksibel, madrasah tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban

formal, tetapi benar-benar mewujudkan visi pendidikan Islam sebagai rahmatan lil 'alamin yang menghargai martabat setiap insan tanpa diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C., Komariyah, L., Aznem, A., Tandi Payung, L., Heri Kesuma, A., & Pendidikan, M. (n.d.). 2025, Pages 739-750(online) Journal of Education Research. *Journal of Education Research*, 6(3).
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Dicky Artanto, Hasan Ibadin, & Suwadi. (2023). Penerapan Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) Dalam Program Rintisan Madrasah Unggul Di MTsN 1 Yogyakarta. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 68–82. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v5i1.543>
- Firli, I., & Widyastono, H. (2020). *Analisis Kesiapan Guru Terhadap Program Inklusi* (Vol. 3, Issue 1).
- Huda M, ,Hafni. (2025) *Implementasi Pendidikan Inklusif di Madrasah Ibtida'iyah (tantangan dan strategi penguatan)*. Premiere, 7(1).
- Kinanthi, T. K., Wardani, D. K., Sarie, A. C., & Marini, A. (2024). Meningkatkan Efektivitas Manajemen Sekolah dalam Penerapan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 9. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.532>
- Muttaqya, A.T., et al (2025). Kesiapan Guru Dalam Menghadapi Pendidikan Inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus. *Pendas : Jurnal ilmiah pendidikan dasar*.10(1)
- Octavia Ramadani Uspan, S., Fujiaturrahman, S., & Guru Sekolah Dasar, P. (n.d.). *STRATEGI GURU DALAM MENGELOLAH KELAS INKLUSIF SEKOLAH DASAR*.
- Purnama, S. G., & Susanna, D. (2020b). Hygiene and sanitation challenge for covid-19 prevention in Indonesia. *Kesmas*, 15(2), 6–13. <https://doi.org/10.21109/KESMAS.V15I2.3932>
- Rahmi, A. (2022). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Madrasah di Sumatera Barat. *R2J*, 4(2). <https://doi.org/10.38035/rrj.v4i2>
- Sari, Y., Widiyastuti, M., Yohanes, T., Krismantoro, D., Hestu, B., & Handoyo, C. (2022). Kajian Ideologis Pancasila Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. In *Jurnal Keindonesiaan* (Vol. 02, Issue 01). <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id>
- Shobri, M. (2025). Peran Kepala Madrasah sebagai Leader Visioner: Strategi Penguatan Mutu dan Integritas Lembaga Pendidikan Islam. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(3), 191–210. <https://doi.org/10.37348/aksi.v3i3.720>
- Sulaiman Kurdi, M., & Yani Km, J. A. (2023). *Dampak Pendidikan Multikultural Pada Madrasah Ibtidaiyah Di Indonesia*. 1(4). <https://doi.org/10.61132/morfologi.v1i6.322>
- Sumartik. (2024.). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah. *Analisis Journal of Education*, 2(1), 195-203
- Suriaman, M., & Rasau, M. R. (n.d.). *Pendidikan Guru 2023 Literasi Kita Indonesia Volume 4 Nomor 2 PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM MERDEKA BELAJAR DI MADRASAH IBTIDAIYAH*. <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v4i1>
- Syaifudin, M. (2021). Implementasi Pendidikan Inklusif di Madrasah Ibtidaiyah di Jawa Timur. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 184–200. <https://doi.org/10.54180/elbanat.2021.11.2.184-200>

Wathoni, K. (n.d.). *IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM*.
http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion_%28education%29,
Zuhriyah S.A (2024). Meningkatkan Kesetaraan Pendidikan, G., & Jember Skripsi, J.
(n.d.-b). *OPTIMALISASI KURIKULUM MERDEKA PADA PENDIDIKAN INKLUSIF*